

Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim *Development, Deforestation and Climate Change*

Bowo Dwi Siswoko*

Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta

Abstract

Natural resources utilities to fulfill human's needs have been occurring massively since a concept of "progress" became human's dreams. To achieve the progress, development concept that means as serious efforts to avoid damage and strive into betterment has emerged. The first development ideology that was emerged and developed was modernization. Industrialization as main character of modernization caused improvement in various aspects of life. From environmental aspect, economic improvement achieved has caused various environmental impacts that harmful to human's life, such as deforestation, forest degradation and climate change. Since 1980's, deforestation has extended to a very complex environmental issue globally. Deforestation could be seen as a side effect of a particular policy or political action. On the other hand, deforestation caused other various environmental problems, such as global warming. Global warming occurred since there was an increase of greenhouse gases concentration in the atmosphere. The relation among development, deforestation, and climate change was analyzed through analysis on power relation and conflict of interest among actors involved. The analysis showed that various strategies in development and environmental impact mitigations that conducted by developing countries were actually a form of power and knowledge domination of developed countries. Through international institutions, they are offering atonement concepts in various schemes which imply particular missions that basically they still want to obtain profits from developing countries without taking the risks from the execution of the schemes.

Keywords: *development, modernization, deforestation, global warming, power relation*

**Penulis untuk korespondensi, e-mail: bdsiswoko@ugm.ac.id*

Pendahuluan

Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan dan menganalisis keterkaitan antara konsep dan aktivitas pembangunan dengan berbagai isu lingkungan. Kedua hal tersebut diduga memiliki hubungan fungsional yang kuat terutama jika ditinjau dari sudut pandang teori politik lingkungan. Banyak ilmuwan pemerhati lingkungan yang mencoba menguraikan hubungan kausal diantara keduanya berdasarkan kenyataan empiris melalui analisis terhadap data lapangan. Beberapa diantaranya berupaya untuk mengkompromikan keduanya agar tidak saling kontraproduktif. Sebagian lagi membahas tentang munculnya berbagai kebijakan negara tentang penyelamatan lingkungan sebagai bentuk respon dari berbagai problem lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Tulisan ini menyajikan sisi lain dari hubungan tersebut, yaitu dari sudut pandang relasi kuasa yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam berbagai proses pembangunan dan dampak yang ditimbulkan.

Konsep politik selalu berkaitan dengan aktor, kepentingan dan kekuasaan. Usaha dari setiap aktor untuk mewujudkan keinginan atau kepentingannya

sering diartikan sebagai politik. Lasswel (dalam Varma 2003) mengartikan politik sebagai sebuah perjuangan untuk meraih sesuatu dalam keterbatasan sumberdaya. Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatan sumberdaya alam oleh manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya akan selalu bersentuhan dengan dimensi-dimensi politik. Hal ini dikarenakan sebagian sumberdaya alam bersifat terbatas dan dibutuhkan oleh sekian banyak manusia, sehingga dimungkinkan terjadi perebutan untuk mendapatkannya. Siapa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan akan mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak memilikinya. Dari sinilah sering muncul adanya ketidakadilan dalam mendapatkan kemanfaatan dari sumberdaya alam yang ada.

Di sisi lain, manusia sering berbuat rakus dan hilang kendali dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga kadang melebihi kapasitas daya dukung sumberdaya tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi sumberdaya alam yang kemudian diikuti dengan munculnya dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Dari sinilah muncul berbagai usaha manusia untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya ataupun upaya

penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan. Dikarenakan hal ini menyangkut kepentingan banyak pihak dan melibatkan sekian banyak aktor, maka kedua usaha tersebut tidak mudah dilakukan, dan bahkan sering terjadi konflik di dalamnya.

Deforestasi, degradasi hutan dan perubahan iklim (*climate change*) telah menjadi isu lingkungan yang menarik perhatian banyak pihak dalam empat dekade terakhir, dan diprediksi akan terus menjadi topik pembicaraan kedepannya karena kompleksitas yang dimilikinya. Kerusakan hutan dengan berbagai komponen biofisiknya dianggap berkontribusi pada peningkatan pemanasan global (*global warming*) yang merupakan salah satu varian dari perubahan iklim. Pemanasan global diyakini akan memiliki sekian dampak negatif yang membahayakan kehidupan manusia. Peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebabnya merupakan fenomena yang hampir tak tertanggulangi dalam suasana kehidupan modern yang bersifat konsumtif seperti saat ini. Kepunahan beberapa jenis makhluk hidup, munculnya badai tropika, kekeringan dan banjir, hilangnya keragaman hayati (*biodiversity*) serta degradasi lahan menjadi ancaman yang menakutkan sehingga memaksa manusia berfikir keras untuk menahan laju degradasi hutan dan pemanasan global. Negara maju maupun berkembang, lembaga-lembaga internasional, dan berbagai *civil society* telah terlibat dalam upaya penanggulangan tersebut.

Dalam perjalanan negosiasi, kerjasama, dan implementasi dari berbagai bentuk kebijakan penyelamatan dari deforestasi, degradasi hutan dan pemanasan global, masing-masing aktor akan berinteraksi dan melakukan tawar-menawar untuk menyepakati sebuah konsensus yang dianggap mampu mengakomodir kepentingan masing-masing. Pada titik inilah dinamika politik mulai berlangsung dan berkembang. Dalam dinamika ini akan terjadi berbagai bentuk relasi kuasa yang terjadi baik antar aktor yang dominan (pemilik kekuasaan) maupun antara aktor dominan dengan aktor yang terpinggirkan (lemah). Relasi kuasa tersebut terkadang berjalan tidak adil dan cenderung merugikan pihak tertentu. Pihak yang dirugikanpun seringnya tidak menyadari bahwa dia sedang dijajah oleh pihak lain, sehingga dia akan terus menikmati penjajahan tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan diarahkan untuk menjelaskan relasi kekuasaan yang terjadi dalam kancah politik lingkungan untuk penyelamatan dunia dari kejahatan deforestasi dan perubahan iklim global. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia diungkap dan dianalisis lebih lanjut guna mendukung argumentasi dan tendensi-tendensi yang didapatkan nantinya. Dalam melakukan pembacaan dan analisis terhadap fenomena tersebut, penulis akan memanfaatkan berbagai kerangka pemikiran dalam sebuah teori pembangunan yang bernama postmodernisme.

Postmodernisme

Postmodernisme lebih dikenal sebagai gerakan pemikiran dan bukan merupakan suatu teori perubahan sosial. Namun analisis postmodernisme terhadap modernisme termasuk kritik. Analisis tentang diskursus (*discourse*), kekuasaan (*power*), dan pengetahuan (*knowledge*) merupakan sumbangan yang besar terhadap kritik pembangunan yang merupakan diskursus yang menyiratkan dominasi pendisiplinan dan normalisasi Dunia Pertama (negara maju) terhadap Dunia Ketiga (negara berkembang). Dari Foucault kita belajar bahwa diskursus pembangunan adalah alat untuk mendominasi. Dalam empat dekade terakhir, diskursus pembangunan menjadi strategi dominasi, dan digunakan sebagai alasan untuk memecahkan masalah 'keterbelakangan' yang dirancang setelah Perang Dunia Kedua. Padahal, keterbelakangan rakyat adalah akibat dari kolonialisme yang panjang (Fakih 2006).

Esensi dari pemikiran kaum postmodernis adalah bahwa mereka melihat konsep-konsep atau gagasan pembangunan merupakan sebuah pengetahuan, dan pengetahuan tersebut tidak pernah lepas dari kekuasaan. Jadi menurut mereka, pengetahuan adalah sebuah kekuasaan. Pengetahuan merupakan produk dari sebuah relasi kekuasaan tertentu. Namun kekuasaan tidak semata-mata hasil dari pengetahuan. Oleh karena itu untuk dapat melihat atau menemukan pola-pola hubungan kekuasaan dalam sebuah pengetahuan perlu dilakukan diskursus terhadap pengetahuan tersebut.

Kaum postmodernis menganggap bahwa pembangunan merupakan sebuah konsep untuk membentuk atau mengatur sebuah masyarakat atau negara sesuai dengan keinginan dari pemilik kekuasaan. Negara-negara maju sebagai pemilik kekuasaan menyadari bahwa kelangsungan kekuasaan mereka juga bergantung kepada negara-negara berkembang. Untuk melanggengkan kekuasaan tersebut perlu dilakukan proses subordinasi terhadap negara-negara berkembang menjadi negara dalam kategori abnormal. Sedangkan apa yang ada di negara-negara maju dianggap sebagai sesuatu yang normal. Berbagai konsep pembangunan kemudian ditawarkan oleh negara maju untuk mengubah kondisi negara berkembang dari abnormal menjadi normal. Proses pendisiplinan dengan menetapkan siapa yang dianggap normal dan abnormal serta usaha-usaha yang harus dilakukan agar yang abnormal menjadi normal itulah yang sering dimaknai sebagai sebuah relasi kekuasaan.

Analisis terhadap kekuasaan dan kemajuan pengetahuan memungkinkan kita untuk memahami peran pengetahuan pembangunan dalam melanggengkan dominasi terhadap kaum marjinal. Pembangunan di negara berkembang adalah contoh sempurna tentang tempat berbagai kekuasaan dunia, sekaligus adanya hubungan penting tentang bagaimana kekuasaan ditolak di negara berkembang dan di negara maju. Praktek kekuasaan dapat dilihat, tetapi sulit

diidentifikasi, yakni di dalam diskursus tempat bersatunya kekuasaan dan pengetahuan (Fakih 2006).

Relasi Kuasa di Balik Eksploitasi Sumberdaya Alam

Pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia berjalan dengan masif semenjak konsep *progress* (kemajuan) telah menjadi cita-cita setiap manusia. Konsep ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ajaran teologis tentang *life cycle* yang menyatakan bahwa siklus kehidupan manusia terdiri dari tiga fase, yaitu *born*, *adult* dan *dead*. Ajaran ini dianggap melemahkan semangat manusia untuk berkarya dan berjuang dalam hidup ini, karena nantinya manusia akan mati. Sehingga dimunculkanlah ajaran baru tentang siklus hidup untuk mengkonter efek negatif dari ajaran tersebut yaitu *born*, *adult* dan *progress*. Dalam ajaran ini *progress* akan menjadi cita-cita akhir yang selalu akan dikejar dan diperjuangkan oleh manusia. Konsep *progress* tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga macam kriteria, yaitu *rationality* (ilmu pengetahuan dan teknologi), *prosperity* (ekonomi) dan *liberty* (politik).

Untuk memperoleh kemajuan tersebut maka muncullah konsep pembangunan (*development*), artinya sebuah upaya serius untuk menghindari kehancuran atau kerusakan menjadi sesuatu yang lebih baik (*betterment*). Pembangunan juga dikonsepsikan sebagai upaya untuk mengubah dari masyarakat tradisional (dengan karakter statis, dikuasai alam, dan irasional) menjadi masyarakat modern (dengan karakter menguasai alam, dinamis, dan rasional), sehingga teori pembangunan yang pertama kali muncul dan berkembang adalah teori modernisasi. Pada intinya, berbagai pemikiran dalam teori ini berupaya untuk mengubah masyarakat terbelakang menjadi masyarakat modern dengan indikator kemajuan yang utama berupa pertumbuhan fisik dan ekonomi. Sejak saat itulah setiap negara berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan tersebut dengan salah satunya melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam.

Bagi negara-negara negara berkembang, proses kolonialisasi dari negara-negara barat (negara maju) kepada mereka selama berabad-abad selalu menyebabkan rakyat di negara terjajah kehilangan hak dan kesempatan menikmati sumberdaya alam yang mereka miliki. Pada awalnya, penjajahan dilakukan secara fisik dengan menguras kekayaan alam dan tenaga manusia di negara terjajah, namun dalam perkembangannya kolonialisasi berubah bentuknya menjadi adanya penetrasi teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyebabkan negara-negara berkembang tetap terpinggirkan dan dirugikan. Salah satu bentuk dominasi negara barat tersebut adalah keberhasilan mereka menjadikan modernisasi sebagai sebuah ide dasar dalam pembangunan yang harus dilaksanakan oleh negara berkembang guna

memperoleh kemajuan sebagaimana yang telah diraih oleh negara-negara maju.

Ide dasar dari konsep pembangunan yang dimunculkan oleh negara barat tersebut sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya secara kontinyu dari kemajuan pengetahuan dan industri yang mereka miliki, sebagaimana tersirat dalam pernyataan Presiden Amerika Serikat Harry Truman pada tahun 1949 (dalam Banerjee 2003), yang kemudian dikemas dalam berbagai skema pembangunan di negara-negara berkembang (terbelakang). Landasan pemikiran tersebut mengharuskan adanya pemisahan dan penetapan kategori siapa negara maju yang harus ditiru dan siapa negara berkembang yang harus dilaksanakan pembangunan padanya. Kemudian melalui lembaga-lembaga internasional, diciptakanlah kategori-kategori dengan indikator yang diciptakan oleh negara maju yang menyebabkan negara berkembang dan terbelakang masuk ke dalam kategori *underdevelopment*.

Pengkategorian ini mengakibatkan negara berkembang berusaha sedemikian rupa untuk mencapai kemajuan sebagaimana yang telah diraih oleh negara maju dengan skema-skema tertentu yang dalam prakteknya cenderung merupakan sebuah bentuk eksploitasi negara maju kepada mereka. Masyarakat di negara berkembang akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang mereka miliki untuk mendapatkan uang guna meningkatkan perekonomian mereka. Tindakan ini dalam kenyataannya cenderung tidak terkontrol dan mengabaikan kelestarian alam. Ini disebabkan karena mereka tergiur oleh janji-janji pembangunan melalui skema modernisasi yang dianggap bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam skema ini, pertumbuhan ekonomi menjadi sesuatu yang mutlak harus dicapai dalam pembangunan.

Industrialisasi sebagai ciri utama dari abad modernisasi telah melahirkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, pembangunan dengan label ini masih menyisakan kemiskinan di berbagai negara yang oleh mereka dianggap sebagai negara berkembang. Perbedaan antara si kaya dan si miskin juga semakin tajam serta beberapa masyarakat pinggiran tetap kehilangan hak dan kemerdekaan untuk memperoleh manfaat secara lebih adil dari pembangunan. Jika dilihat dari aspek lingkungan, kemajuan yang berhasil dicapai secara ekonomis dari pembangunan telah melahirkan berbagai dampak lingkungan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, antara lain adalah pemanasan global (*global warming*), hilangnya keragaman hayati, erosi dan banjir, penipisan lapisan ozon, serta polusi udara dan air.

Deforestasi dan Perubahan Iklim sebagai Isu Politik Global

Isu lingkungan mulai masuk dalam pembicaraan politik semenjak terdeteksinya berbagai macam penurunan kualitas lingkungan yang dapat mengancam keselamatan kehidupan manusia. Kerusakan hutan, hilangnya kesuburan tanah, pengotoran udara, kelangkaan air, dan berbagai problem lingkungan lainnya menyebabkan manusia menjadi sadar akan perlunya upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Berbagai aktivitas fisik dan budaya manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup dianggap sebagai penyebab utama kerusakan tersebut. Hal ini dikarenakan perilaku manusia tersebut tidak mematuhi norma dan etika lingkungan dan cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap berbagai sumberdaya alam demi meraih kemajuan terutama dalam bidang ekonomi yang merupakan tujuan utama dari pembangunan dengan label modernisasi.

Pada prinsipnya, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya degradasi atau kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah adanya eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui, yang meliputi eksploitasi bahan bakar fosil, eksploitasi hutan untuk bahan bakar kayu, dan alih fungsi hutan untuk lahan pertanian dan industri. Yang kedua adalah terjadinya pembebanan terhadap alam yang melebihi kapasitas atau daya dukungnya, misalnya adanya akumulasi berlebih dari logam berat di tanah dan terlalu tingginya konsentrasi gas rumah kaca di udara. Yang ketiga adalah terus berlangsungnya pengrusakan ekosistem untuk berbagai kepentingan manusia, misalnya untuk lahan pemukiman penduduk, tanaman industri dan berbagai pembangunan infrastruktur (Bruhl dan Simonis 2001).

Dampak dari adanya *over* eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah terjadinya deforestasi, degradasi hutan dan pemanasan global. Menurut Humphreys (1996), deforestasi terjadi ketika areal hutan ditebang habis dan diganti dengan bentuk penggunaan lahan lainnya. Sedangkan degradasi hutan merupakan penurunan kualitas hutan, dan terjadi ketika diversitas dari spesies tertentu dan potensi biomassa mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan sebab tertentu misalnya karena adanya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak dilakukan secara lestari. Sejak tahun 1980-an, deforestasi telah menjadi isu lingkungan global yang sangat kompleks.

Kompleksitas tersebut muncul karena dua faktor. Yang pertama adalah bahwa isu deforestasi telah melibatkan sekian banyak aktor politik mulai dari negara sampai dengan masyarakat sipil (*civil society*) baik nasional maupun internasional yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap pemanfaatan hutan. Yang kedua adalah karena keterkaitan erat dari isu deforestasi tersebut dengan isu-isu politik dan lingkungan lainnya.

Deforestasi bisa dianggap sebagai produk dari sebuah kebijakan atau tindakan politik tertentu, dan disisi lain deforestasi menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan lingkungan lainnya, seperti pemanasan global, erosi tanah, dan kerusakan biodiversitas (Humphreys 1996).

Di Indonesia, deforestasi sering terjadi antara lain karena adanya program-program pembangunan tertentu, misalnya pembukaan hutan untuk lahan pemukiman dan pertanian di areal transmigrasi. Selain itu juga banyak terjadi alih fungsi hutan untuk kegiatan pertambangan dan perindustrian yang seringkali hal ini memunculkan konflik baik antara masyarakat dengan pengusaha maupun antara pengusaha dengan berbagai lembag swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan. Sedangkan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh antara lain adanya kesalahan dalam manajemen hutan seperti penebangan yang melebihi etat dan permudaan yang selalu gagal. Selain itu juga karena adanya pencurian kayu dan hasil hutan lainnya secara masal oleh masyarakat sekitar hutan yang merasa tidak mendapat keadilan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dan terhimpit oleh persoalan ekonomi keluarga. Menurut Bank Dunia (dalam Handadhari 1999), hutan tropika di Indonesia mengalami kerusakan sekitar 1 juta hektar pertahunnya.

Salah satu dampak utama dari deforestasi adalah terjadinya penurunan kualitas atmosfer. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (*greenhouse gases*) yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Proses tersebut kemudian dikenal dengan istilah *radiative forcing*. Ada empat gas rumah kaca utama yang berkontribusi dalam proses tersebut, yaitu karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrous oksida (N₂O) dan klorofluorokarbon (CFCs). Pemanasan global tersebut berpotensi untuk mendatangkan bencana yang sangat membahayakan. Diprediksikan bahwa pemanasan global yang terus bertambah akan dapat menyebabkan perubahan pola produksi pertanian global, mencairnya es di kutub Artic dan Antarctic, peningkatan suhu air laut dan peningkatan permukaan air laut yang dapat mengancam kehidupan di berbagai pantai di dunia (Humphreys 1996).

Perhatian dunia internasional terhadap isu perubahan iklim (*climate change*) bermula dari adanya *Climate Convention* yang ditandatangani di Rio de Janiero pada tahun 1992. Bodansky (1996) mengidentifikasi adanya tiga faktor yang menyebabkan isu perubahan iklim berkembang dari permasalahan ilmu pengetahuan menjadi isu politik internasional. Yang pertama adalah bahwa isu ini telah menyebabkan sekian banyak ilmuwan dan non-governmental organization (NGO/LSM) melaksanakan berbagai konferensi dan *workshop* guna membahas isu tersebut. Pada pertengahan tahun 1980, berbagai kebijakan tentang iklim mendapatkan momentum untuk

berkembang ketika berbagai konsensus dari para ilmuwan tentang isu pemanasan global telah berhasil masuk ke dalam agenda pembahasan dari para komunitas politik. Yang kedua adalah penemuan adanya lubang ozon pada tahun 1987 telah menarik perhatian dunia terhadap isu lingkungan atmosfer tersebut. Dan yang ketiga adalah terjadinya musim panas yang aneh (luar biasa) yang terjadi di Amerika pada tahun 1988, yang kemudian para ilmuwan menjelaskan bahwa hal itu akibat dari aktivitas manusia, telah menarik perhatian publik dan memberikan tekanan kepada ranah politik atau para pengambil kebijakan untuk memperhatikan isu lingkungan tersebut (Wilenius 1999).

Sejak saat itulah isu perubahan iklim menjadi pembicaraan hangat oleh dunia internasional dengan munculnya berbagai aktor nasional maupun internasional yang senantiasa bernegosiasi dan berdiskusi mengenai bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi semakin parahnya tingkat pemanasan global maupun cara untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Negosiasi tersebut merupakan cerminan dari upaya politis dari masing-masing aktor tersebut untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing terkait dengan isu ini. Berbagai konvensi internasional berhasil disepakati berkaitan dengan isu ini, antara lain yang terkenal adalah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC, 1992) dan *Kyoto Protocol* (1997). Berbagai konvensi yang ada telah memaksa negara maju dan negara berkembang untuk menjalankan kebijakan tertentu guna menanggulangi dampak perubahan iklim tersebut.

Bentuk Dominasi Kekuasaan dan Pengetahuan

Kasus pengelolaan hutan tropika di Indonesia. Setelah Bangsa Indonesia lepas dari kolonialisme, pemerintah mulai melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan di setiap sektor kehidupan, baik sosial, politik maupun ekonomi. Ketika bangsa ini kemudian rela untuk menggunakan indikator-indikator fisik dan ekonomi untuk menentukan arah dan cita-cita pembangunan, maka modernisasi menjadi pilihan ideologi yang tak terelakkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa modernisasi merupakan produk negara maju untuk melanggengkan dominasi kekuasaannya atas negara berkembang dalam bentuk lain. Negara maju telah memiliki sarana dan prasarana serta pengetahuan yang lengkap untuk berlangsungnya proses modernisasi, sehingga setiap bangsa manapun yang membutuhkannya harus mengimpornya dari mereka.

Sebagai contoh adalah bahwa dalam bingkai modernisasi, maka ada dual hal pokok yang harus tersedia, yaitu modal dan strategi pembangunan. Kedua hal ini pada awalnya tidak dimiliki oleh Bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini perlu upaya untuk mendapatkannya. Modal pembangunan bisa didapatkan

dari pinjaman luar negeri dan kemudian digunakan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang dipunyai (salah satunya adalah hutan) untuk mendapatkan dana segar pembangunan. Kemudian untuk ilmu pengetahuan tentang strategi pembangunan mau tidak mau kita harus mengimpornya dan yang terpilih adalah teori dari Rostow yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Pada masa awal kemerdekaan di bawah pemerintahan Presiden Sukarno, sektor kehutanan masih menjadi sektor ekonomi pinggiran dan perusahaan hutan skala besar belum berkembang. Setelah Orde Lama tumbang, untuk mengatasi kesulitan ekonominya, rezim Orde Baru berupaya menggenjot pertumbuhan devisa sebesar-besarnya melalui eksploitasi sumber daya alam termasuk diantaranya adalah hutan. Pemanfaatan sumber daya hutan terutama terhadap hutan tropika (di luar Jawa) untuk menyokong devisa negara tersebut dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 68 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Perusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk merangsang usaha di bidang kehutanan dengan sasaran hutan alam di Luar Jawa. Sejak saat itulah sektor kehutanan menjadi andalan dalam mempercepat pertumbuhan devisa negara (Nurrochmat 2005).

Dengan kebijakan tersebut, negara berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup besar sehingga mendapatkan dana segar guna melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dan dapat melunasi hutang-hutang luar negerinya baik kepada Bank Dunia maupun dari negara-negara maju lainnya. Bahkan sampai dengan awal tahun 1990-an, Indonesia berhasil menguasai pasar produk kayu dari hutan tropika, baik berupa kayu mentah (*log*) maupun kayu olahan (kayu lapis), dan mampu mengalahkan pesaing-pesaing dari negara Asia lainnya maupun negara maju. Hal ini cukup membanggakan, meskipun yang terjadi adalah bahwa prestasi tersebut harus dibayar dengan adanya kerusakan hutan tropika yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ketahun.

Menurut Nurdjana dkk. (2005), dampak dari kerusakan hutan di Indonesia menurut data Departemen Kehutanan tahun 2003 menyebutkan bahwa luas hutan di Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar, dengan laju degradasi hutan dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Kemudian pada tahun 2004, data dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar dan negara telah kehilangan Rp 8,3 miliar perhari akibat *illegal logging*.

Berangkat dari realitas tersebut, negara-negara maju yang sebenarnya telah mengalami proses industrialisasi dengan mengorbankan sumberdaya

hutan yang mereka miliki kemudian menuduh bahwa proses penggundulan hutan tropika mempunyai andil cukup besar pada proses penambahan pemanasan global (*global warming*), sehingga mereka mendesak negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropika termasuk Indonesia, untuk melakukan penanganan terhadap masalah ini. Tuduhan ini sebenarnya telah dibantah oleh negara berkembang dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pernyataan sepihak dari negara-negara maju, karena kalau ingin membahas isu *global warming* harus melihat hutan secara global, yaitu hutan tropika dan juga hutan temperate yang umumnya ada pada negara-negara maju, sehingga jangan hanya menyalahkan negara berkembang. Konflik kepentingan ini kemudian dalam berbagai kasus dimenangkan oleh negara maju melalui berbagai skema politik yang dimainkannya.

Ketika Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi misalnya, pada saat itu kemudian *International Monetary Fund* (IMF) menawarkan berbagai macam bantuan untuk menyelesaikan krisis tersebut dengan syarat Indonesia harus mentaati butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam *Letter of Intent* (*LoI*). Dalam *LoI* inilah kekuasaan dan kontrol negara maju dimainkan agar mereka dapat terhindar dari ancaman adanya monopoli di pasar kayu hutan tropika, terutama oleh Indonesia. Salah satu butir kesepakatan itu adalah harus dibubarkannya Badan Pemasaran Bersama (BPB) dalam penjualan produk kayu lapis Indonesia. Padahal sebenarnya lembaga ini telah berhasil mengatur dan mengelola sirkulasi ekspor kayu lapis dari Indonesia dengan baik. Dengan pembubaran badan ini maka setiap industri kayu lapis Indonesia bisa langsung memasarkan produknya ke luar negeri dalam jumlah dan dengan harga berapapun, sehingga suplai kayu lapis di pasaran meningkat tajam dan negara-negara maju dapat membelinya dengan harga yang relatif murah. Kemudian terkait dengan dampak kerusakan hutan tropika, maka untuk menyelamatkan negara-negara maju dari ancaman kerusakan lingkungan, mereka mengeluarkan sebuah strategi yang dinamakan ekolabel *eco-labelling*, sebagai upaya untuk mengerem laju eksploitasi dan pengrusakan hutan tropika.

Menurut Prakosa (1996), para konsumen produk perkayuan di negara-negara Eropa dan Amerika Utara memiliki kecenderungan akan memilih produk yang proses pembuatannya tidak merusak lingkungan. Karena selera konsumen merupakan unsur pokok dalam pemasaran, maka para produsen umumnya mengantisipasi ini dengan mencantumkan pada produk mereka bahwa barang yang mereka jual sejak awal proses pembuatannya tidak merusak lingkungan, dalam bentuk label yang kemudian dikenal dengan istilah *eco-labelling*. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Khakim (2005) bahwa isu sistem labelisasi atau *eco-labelling* mulai digulirkan oleh beberapa negara maju setelah mereka menilai atau bahkan mencurigai

adanya pengrusakan hutan tropika secara besar-besaran yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan global secara serius berupa pemanasan global. Akibatnya, labelisasi terhadap hasil hutan menjadi suatu kewajiban bagi negara produsen kayu hutan tropika seperti Indonesia, dimana pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Pertarungan kepentingan dalam isu *Climate Change*. Perdebatan tentang isu perubahan iklim hingga saat ini masih berkembang terutama dalam hal siapa yang paling berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global dan siapa yang harus bertanggung jawab menanggulangnya. Negara-negara maju dengan aktivitas industrinya tentu akan menjadi sasaran paling mudah untuk dicap sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di atmosfer, sehingga negara majulah yang mestinya bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Wilenius (1999), bahwa faktor paling utama yang menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca adalah tingkat konsumsi yang tinggi dari individu dan masyarakat terutama di negara-negara maju sebagai ciri dari kehidupan modern, sehingga akan sangat sulit untuk mencari upaya penanggulangnya kecuali dengan mengubah gaya hidup modern tersebut.

Namun negara maju juga melemparkan tuduhan kepada berbagai negara yang memiliki sumberdaya hutan tropika besar yang sebenarnya adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia, bahwa deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di negara tersebutlah yang menyebabkan pemanasan global.

Dalam kasus lain, saat ini sejumlah negara telah menandatangani Protokol Kyoto tentang perubahan iklim yang merupakan tindak lanjut upaya mencegah terjadinya pemanasan global. Protokol Kyoto adalah sebuah kesepakatan internasional yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) rata-rata sebesar 5,2% pada tahun 2008-2012, di bawah tingkat emisi GRK rata-rata tahun 1990 (Susandi 2007). Dalam salah satu bentuk mekanisme dari Protokol Kyoto yaitu *Clean Development Mechanism* (CDM), padanya terdapat berbagai upaya dan kesepakatan agar negara-negara maju mampu menurunkan tingkat emisi gas rumah kacanya sampai pada level tertentu. Dalam mekanisme CDM ini negara berkembang diminta untuk berkontribusi dalam membantu negara maju dalam menurunkan emisinya.

Sebagai bentuk operasionalisasi dari kesepakatan tersebut adalah bahwa bagi negara berkembang yang memiliki kekayaan alam berupa hutan tropika yang relatif luas, maka negara-negara berkembang harus melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebaik-baiknya agar tidak terjadi degradasi hutan atau bahkan deforestasi. Kemudian, negara maju harus bersedia untuk membayar dalam jumlah tertentu atau melakukan transfer teknologi tertentu sebagai kompensasi dari upaya negara berkembang tersebut.

Kompensasi tersebut merupakan bentuk penghargaan atau balas jasa kepada negara berkembang yang telah bersedia untuk memelihara dan mengelola dengan baik sumberdaya hutan yang dimilikinya sehingga mampu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Sekilas tampaknya kesepakatan tersebut berjalan adil, namun jika dicermati lebih dalam maka sebenarnya terlihat upaya negara maju untuk senantiasa melakukan kontrol dan penetrasi iptek terhadap negara berkembang. Teknologi industri yang ramah lingkungan serta mekanisme mitigasi dari dampak pemanasan global diduga telah dipersiapkan sejak awal oleh negara maju yang kemudian harus diadopsi oleh negara berkembang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana menghitung emisi karbon dan sejauh mana tingkat bahayanya memang masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan, namun tampaknya negara maju sudah lebih siap dalam hal pengetahuan tersebut. Implikasinya adalah bahwa ukuran-ukuran tingkat emisi gas rumah kaca yang merupakan informasi dasar untuk sebuah negosiasi atau perjanjian mengenai mekanisme mitigasi yang harus dilaksanakan baik oleh negara maju maupun berkembang akan selalu mengacu pada pendapat atau temuan mereka. Harus disadari bahwa angka-angka tersebut sangat rawan untuk dimanipulasi demi tujuan politis atau kepentingan tertentu. Sementara itu, Amerika Serikat yang notabene adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar menyatakan keluar dari Protokol Kyoto tersebut karena dianggap akan merugikan perekonomiannya. Hal ini merupakan satu bentuk pelarian dari tanggung jawab untuk kemudian melemparkan tanggung jawab itu kepada pihak lain.

Suap Balik

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya negara-negara maju memiliki tantangan kekuasaan yang mampu melakukan intervensi dan kontrol terhadap apa yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang. Pertama yang mereka lakukan adalah membuat suatu pernyataan dan justifikasi bahwa ada yang salah dalam proses pembangunan yang terjadi di negara berkembang, dan itu perlu segera diperbaiki. Kemudian, melalui berbagai institusi internasional yang dimilikinya mereka menawarkan konsep-konsep perbaikan dalam berbagai skema. Dalam konsep-konsep yang mereka tawarkan itulah sebenarnya terkandung misi-misi tertentu yang pada dasarnya mereka ingin tetap mendapatkan keuntungan dari negara berkembang tanpa harus menerima resiko dari dilaksanakannya konsep tersebut. Sebagai contoh bukti adalah melalui butir-butir kesepakatan dalam *LoI* dan isu *eco-labelling*, negara maju berusaha untuk tetap melanggengkan kontrol dan dominasinya kepada bangsa Indonesia melalui media pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Belajar dari pengalaman tersebut, maka sebenarnya bangsa Indonesia harus lebih bijaksana dalam memilih strategi pembangunan yang akan dilaksanakan. Bangsa Indonesia tidak boleh terlalu percaya terhadap tawaran ataupun provokasi dari negara lain yang seolah-olah ingin membantunya. Bangsa Indonesia juga tidak harus selalu mengadopsi berbagai pemikiran negara maju untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Bangsa Indonesia harus yakin bahwa bangsa ini memiliki nilai-nilai dan budaya luhur yang harus dilestarikan dan tidak perlu mengimpor nilai dan budaya negara lain yang belum tentu lebih baik. Segala persoalan yang ada di negeri ini hanya bangsa Indonesia sendiri yang paling mengetahuinya, dan paling mengerti bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk mengatasinya.

Sebagai contoh, dalam pembangunan sektor kehutanan, diperlukan strategi yang sangat berbeda dengan strategi pembangunan konvensional dengan unsur universal berupa modal, tenaga kerja, dan investasi. Strategi pembangunan kehutanan memiliki ciri khas yang harus senantiasa diwarnai dan dibatasi oleh dimensi-dimensi ekologis yang sangat spesifik. Selain itu ke depannya, strategi pembangunan kehutanan juga harus mampu mengakomodir partisipasi dan kepentingan dari seluruh pihak terkait serta senantiasa memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Jadi pada intinya Bangsa Indonesia tidak perlu mencari citra atau warna masa depan kehutanannya pada konsep dan pemikiran dari negara lain, tetapi kita harus mampu menetapkan visi dan misi pembangunan kehutanan sesuai dengan kondisi ekologi dan tata nilai serta budaya bangsa Indonesia sendiri.

Daftar Pustaka

- Banerjee, S.B. 2003. *Who Sustains Whose Development? Sustainable Development and the Reinvention of Nature*. SAGE Publications, London.
<http://www.colby.edu/personal/t/thtieten/susdevgen.html>. Agustus 2007.
- Bruhl, T. dan Simonis, U.E. 2001. *World Ecology and Global Environmental Governance*. Science Center Berlin D-10785, Jerman. <http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2001/ii01-402.pdf>. Juli 2008.
- Escobar, A. 1995. *Encountering Development (Making and Unmaking of Third World)*. Princetown University Press, Princetown, New Jersey. <http://www.ebookmall.com/ebook/111022-ebook.html>. April 2008.
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 250hlm.

- Handadhari, T. 1999. Membenahi Manajemen Pengusahaan Hutan. *Di dalam*: Prosiding Seminar Menempatkan Kembali Ilmu Kehutanan dalam Pembangunan Kehutanan Masa Depan, Reuni Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta, 3-4 Desember 1999. Hlm.75-80.
- Hettne, B. 2001. Teori Pembangunan dan Tiga Dunia. PT Gramedia, Jakarta. 526hlm.
- Humphreys, D. 1996. Forest Politics. Earthscan Publication Ltd., London. 299hlm.
- Khakim, A. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 302hlm.
- Nurdjana, I.G.M., Prasetyo T., dan Sukardi. 2005. Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 239hlm.
- Nurrochmat, D.R. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 178hlm.
- Prakosa, M. 1996. Rencana Kebijakan Kehutanan. Aditya Media, Yogyakarta. 142hlm.
- Susandi, A. 2007. Emisi Karbon dan Potensi CDM dari Sektor Energi dan Kehutanan Indonesia. Departemen Geofisika dan Meteorologi, ITB, Bandung. http://armisusandi.com/index.php?lang=&action=article.detail&kategori=working_paper&IDArtikel.pdf. Maret 2008.
- Varma, S.P. 2003. Teori Politik Modern. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 516hlm.
- Wilenius, M. 1999. Sociology, Modernity and the Globalization of Environmental Change. International Sociology, London. http://www.unites.uqam.ca/aep/devdur_revues.htm. Maret 2008.